

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek/Subyek Penelitian

Banjarnegara merupakan salah satu kabupaten dari provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjarnegara dapat menjalankan pemerintahan secara menyeluruh berkat bantuan dari OPD yang berada pada wilayah/daerah Banjarnegara. Setiap OPD diberikan tugas untuk membantu Pemkab Banjarnegara dalam menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan menjadi sumber daya manusia yang kompeten di setiap OPD Kabupaten Banjarnegara. Memberikan laporan keuangan yang berkualitas merupakan salah satu tuntutan yang dipegang oleh OPD pada wilayah/daerah Banjarnegara. Maka dari itu penelitian ini dibuat berdasarkan tujuannya yaitu untuk menguji pengaruh dari tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini mengambil sampel berdasarkan tiga pegawai yang menduduki jabatan yang berbeda-beda antara lain yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD), Bendaharaan Penerimaan dan Bendaharaan Pengeluaran pada Dinas dan Badan OPD kabupaten Banjarnegara. Penentuan sampel yang diambil dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan

yang dibuat oleh peneliti bahwa pihak-pihak yang bersangkutan merupakan seorang informan terkait menerapkan standar akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern pemerintah dan menjadi sumber daya manusia yang kompeten di Pemkab Banjarnegara.

Pengumpulan data primer berupa instrumen kuesioner dilakukan dengan menyebarkan ke kantor OPD kabupaten Banjarnegara, yang diberikan langsung kepada pihak – pihak terkait yaitu PPK – OPD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang terdiri dari 24 (dua puluh empat) badan dan dinas sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
6. Dinas Komunikasi dan Informatika
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
8. Dinas Pariwisata dan Budaya
9. Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
11. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan
13. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
15. Dinas Sosial
16. Dinas Tenaga Kerja
17. Dinas Perhubungan

18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
20. Dinas Ketahanan Pangan
21. Badan Kepegawaian Daerah
22. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
24. Satuan Polisi Pamong Praja

Kuesioner yang tersebar dan kembali dari kantor OPD kabupaten Banjarnegara berjumlah 60 kuesioner. Sehingga, tidak ada satu pun kuesioner yang tidak kembali atau persentase pengembalian sebesar 100%. Selanjutnya, kuesioner yang dapat diolah sebagai data penelitian berjumlah 60 kuesioner berdasarkan persentase pengembalian sebesar 100%. Ringkasan penjelasan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Data Penelitian

Data Klasifikasi	Jumlah Kuesioner	Persentase
Kuesioner yang tersebar	60	100%
Kuesioner yang kembali	60	100%
Kuesioner yang tidak dapat diolah	0	0%
Kuesioner yang dapat diolah	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

B. Analisis Karakteristik Responden

Peneliti menggunakan tingkat jabatan, jenis kelamin, tingkat umur, pendidikan terakhir, latar belakang pendidikan dan lama bekerja di OPD sebagai karakteristik responden yang diamati. Berikut merupakan hasil distribusi frekuensi dengan sedikit penjelasan berdasarkan karakteristik responden yang diamati oleh peneliti:

1. Tingkat Jabatan

Perbandingan jumlah responden berdasarkan tingkat jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2
Responden berdasar tingkat jabatan

Tingkat Jabatan	Frekuensi	Persentase
PPK – OPD	24	40%
Bendahara Penerimaan	12	20%
Bendahara Pengeluaran	24	40%
Total	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.2 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar jabatan yang dimiliki yaitu sebagai PPK-OPD sebanyak 24 orang dengan persentase 40%, Bendahara Penerimaan sebanyak 12 orang dengan persentase 20% dan Bendahara Pengeluaran sebanyak 24 orang dengan persentase 40%.

2. Jenis Kelamin

Perbandingan jumlah responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Responden berdasar jenis kelamin

Jenis kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki – laki	26	43,3%
Perempuan	34	56,7%
Total	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar jenis kelamin responden yaitu laki – laki sebanyak 26 orang dengan persentase 43,3% dan perempuan sebanyak 34 orang dengan persentase 56,7%.

2. Tingkat Umur

Perbandingan jumlah responden berdasarkan tingkat umur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Responden berdasar tingkat umur

Tingkat Umur	Frekuensi	Persentase
< 25 tahun	0	0%
26 – 35 tahun	13	21,67%
36 – 55 tahun	45	75%
> 55 tahun	2	3,33%
Total	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar tingkat umur yang dibagi menjadi empat yaitu responden yang berumur kurang dari 25 tahun tidak ada satupun sehingga persentase 0%, responden yang berumur 26 – 35 tahun sebanyak 13 orang dengan persentase 21,67%, responden yang berumur 36 – 55 tahun sebanyak 45 orang dengan persentase 75% dan responden yang berumur lebih dari 55 tahun sebanyak 2 orang dengan persentase 3,33%.

3. Pendidikan terakhir

Perbandingan jumlah responden berdasarkan pendidikan terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.5
Responden berdasar Pendidikan terakhir

Pendidikan	Frekuensi	Persentase
SLTA/Sederajat	20	33,3%
Diploma (D3)	5	8,33%
Strata 1 (Sarjana)	34	56,7%
Strata 2 (Master)	1	1,67%
Strata 3 (Doktor)	0	0%
Total	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar pendidikan terakhir yang diambil dibagi menjadi

lima yaitu responden dengan pendidikan terakhir SLTA/Sederajat sebanyak 20 orang dengan persentase 33,3%, responden dengan pendidikan terakhir Diploma (D3) sebanyak 5 orang dengan persentase 8,33%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 1 (Sarjana) sebanyak 34 orang dengan persentase 56,7%, responden dengan pendidikan terakhir Strata 2 (Master) sebanyak 1 orang dengan persentase 1,67% dan tidak satupun untuk Strata 3 (Doktor) dengan persentase 0%.

4. Latar belakang pendidikan

Perbandingan jumlah responden berdasarkan latar belakang pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.6
Responden berdasar Latar belakang pendidikan

Latar Belakang Pendidikan	Frekuensi	Persentase
Akuntansi	12	20%
Manajemen	13	21,67%
MIPA	4	6,67%
Pertanian	1	1,67%
Lain – lain	30	50%
Total	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar latar belakang pendidikan yang diambil dibagi

menjadi lima yaitu responden yang berlatar belakang pendidikan akuntansi sebanyak 12 orang dengan persentase 20%, responden yang berlatar belakang pendidikan manajemen sebanyak 13 orang dengan persentase 21,67%, responden yang berlatar belakang pendidikan MIPA sebanyak 4 orang dengan persentase 6,67%, responden yang berlatar belakang pendidikan pertanian sebanyak 1 orang dengan persentase 1,67%, dan responden yang berlatar belakang pendidikan lain – lain sebanyak 30 orang dengan persentase 50%.

5. Lama bekerja di OPD

Perbandingan jumlah responden berdasarkan lama bekerja di OPD dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Responden berdasar Lama bekerja di OPD

Lama bekerja di OPD	Frekuensi	Persentase
1 – 5 tahun	30	50%
5 – 10 tahun	10	16,67%
10 – 15 tahun	6	10%
> 15 tahun	14	23,33%
Total	60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar lama bekerja di OPD dibagi menjadi empat yaitu responden yang telah bekerja selama 1 – 5 tahun sebanyak 30 orang dengan

persentase 50%, responden yang telah bekerja selama 5 – 10 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 16,67%, responden yang telah bekerja selama 10 – 15 tahun sebanyak 6 orang dengan persentase 10% dan responden yang telah bekerja selama lebih dari 15 tahun sebanyak 14 orang dengan persentase 23,33%.

6. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Perbandingan jumlah responden yang tersebar di setiap OPD kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8
Responden berdasar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

No.	OPD	Frekuensi	Persentase
1	Dinas Kesehatan	3	5%
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	5%
3	Dinas Lingkungan Hidup	3	5%
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil	3	5%
5	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	5%
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	5%
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	5%
8	Dinas Pariwisata dan Budaya	3	5%
9	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3	5%
10	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	3	5%
11	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3	5%
12	Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan	3	5%
13	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga	2	3,3%
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2	3,3%

No.	OPD	Frekuensi	Persentase
15	Dinas Sosial	2	3,3%
16	Dinas Tenaga Kerja	2	3,3%
17	Dinas Perhubungan	2	3,3%
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2	3,3%
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2	3,3%
20	Dinas Ketahanan Pangan	2	3,3%
21	Badan Kepegawaian Daerah	2	3,3%
22	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	3,3%
23	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	2	3,3%
24	Satuan Polisi Pamong Praja	2	3,3%
Total		60	100%

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.8 dapat dilihat bahwa total responden sebanyak 60 orang dengan proporsi berdasar OPD terdapat dua macam frekuensi yaitu sebanyak 3 orang dengan persentase 5% dan 2 orang dengan persentase 3,3%. OPD dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan persentase 5% dimiliki oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pariwisata dan Budaya, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, serta Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan. Selanjutnya, OPD dengan frekuensi sebanyak 2 orang dengan persentase 3,3% dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Perumahan

dan Kawasan Pemukiman, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Perhubungan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Ketahanan Pangan, Badan Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta Satuan Polisi Pamong Praja.

C. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel sebagai alat bantu untuk membuat suatu kesimpulan. Tabel tersebut berisi empat keterangan untuk masing – masing variabel yang diteliti yaitu nilai minimum (*minimum value*), nilai maksimum (*maximum value*), mean atau rata – rata dan Standar deviasi (*Std. Deviation*). Berikut merupakan tabel statistik deskriptif :

Tabel 4.9

Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	60	38	80	64.23	10.110
Tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	60	71	125	101.60	11.707
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	60	29	60	48.73	5.966
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	60	26	65	51.23	7.388
Kompetensi Sumber Daya Manusia	60	37	85	65.90	9.667
Valid N (<i>listwise</i>)	60				

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.9 dapat dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 60 orang dengan keterangan masing – masing variabel penelitian. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) memiliki nilai minimum sebesar 38 dan nilai maksimum 80 sebesar serta mean atau rata – rata sebesar 64.23. Variabel Tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) memiliki nilai minimum sebesar 71 dan nilai maksimum sebesar 125 serta mean atau rata – rata sebesar 101.60. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) memiliki nilai minimum sebesar 29 dan nilai maksimum sebesar 60 serta mean atau rata – rata sebesar 48.73. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3) 26 memiliki nilai minimum sebesar dan nilai maksimum 65 sebesar serta mean atau rata – rata sebesar 51.23. Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4) memiliki nilai minimum sebesar 37 dan nilai maksimum sebesar 85 serta mean atau rata – rata sebesar 65.90.

Tabel 4.10

Mean distribusi frekuensi jawaban responden tiap variabel/elemen

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y)											
Elemen	Relevan			Andal			Dapat dibandingkan			Dapat dipahami	
Mean	4,06			4,04			3,97			3,93	
Tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1)											
Elemen	PSAP No. 1	PSAP No. 2	PSAP No. 3	PSAP No. 4	PSAP No. 5	PSAP No. 6	PSAP No. 7	PSAP No. 8	PSAP No. 9	PSAP No. 10	PSAP No. 11
Mean	4,19	4,07	4,03	4,18	4,04	3,94	4,08	4,08	4,00	4,10	3,93
Sistem akuntansi keuangan daerah (X2)											
Elemen	Identifikasi			Pencatatan			Pelaporan				
Mean	3,96			4,07			4,13				
Sistem pengendalian intern pemerintah (X3)											
Elemen	Lingkungan pengendalian			Penilaian resiko			Aktivitas pengendalian				
Mean	3,96			3,83			3,97				
Kompetensi sumber daya manusia (X4)											
Elemen	Pengetahuan			Keahlian			Perilaku				
Mean	3,91			3,84			3,89				

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4.10 dapat dilihat bahwa mean dari masing - masing elemen tiap variabel yang berasal dari 60 responden. Kualitas laporan keuangan pemda menunjukkan 2 dari 4 elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral dan lainnya menyetujui serta selalu melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Tingkat penerapan SAP menunjukkan 2 dari 11 elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral dan lainnya menyetujui serta selalu melaksanakan pernyataan yang

diberikan oleh peneliti. Sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan 1 dari 3 elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral dan lainnya menyetujui serta melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. SPIP menunjukkan semua elemen memiliki rata – rata jawaban netral dalam melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Kompetensi SDM menunjukkan semua elemen memiliki rata – rata jawaban netral dalam melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti.

D. Gambaran Penerapan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada OPD Kabupaten Banjarnegara

Tabel 4.11

Gambaran Penerapan Kualitas LKPD pada OPD Kab. Banjarnegara

No.	Pernyataan	Sangat Setuju dan Setuju		Netral		Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Laporan keuangan yang saya susun telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan	52	86,7	7	11,7	1	1,7
2	Informasi dalam laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan untuk mengoreksi keputusan pengguna dimasa lalu (<i>feedback value</i>)	48	80	11	18,3	1	1,7
3	Informasi dalam Laporan keuangan yang saya hasilkan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang akan datang (<i>predictive value</i>)	51	85	6	10	3	5

No.	Pernyataan	Sangat Setuju dan Setuju		Netral		Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Relevan							
4	Laporan Keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan saat ini.	49	81,7	10	16,7	1	1,7
5	Informasi dalam laporan keuangan saya buat secara lengkap yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam mengambil keputusan.	50	83,3	8	13,3	2	3,3
Andal							
6	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan.	50	83,3	5	8,3	5	8,3
7	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya buat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	48	80	10	16,7	2	3,3
8	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan, teruji kebenarannya	48	80	9	15	3	5
9	Informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan yang saya buat telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah	49	81,7	10	16,7	1	1,7
10	Informasi yang dihasilkan dalam laporan OPD yang saya susun tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu	50	83,3	6	10	4	6,7

No.	Pernyataan	Sangat Setuju dan Setuju		Netral		Tidak Setuju dan Sangat Tidak Setuju	
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Dapat dibandingkan							
11	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya.	50	83,3	7	11,7	3	5
12	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah.	51	85	6	10	3	5
13	Saya selalu menggunakan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.	45	75	11	18,3	4	6,7
Dapat dipahami							
14	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna	51	85	7	11,7	2	3,3
15	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan OPD yang saya susun, disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	47	78,3	10	16,7	3	5
16	Laporan Keuangan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti	49	81,7	9	15	2	3,3

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan tabel 4.11 dapat dilihat bahwa persentase dari masing - masing elemen per item pernyataan berasal dari 60 responden. Dalam menggambarkan penerapan kualitas LKPD pada OPD kabupaten Banjarnegara menggunakan 4 elemen dalam pengukurannya yaitu relevan dengan 5 pernyataan, andal dengan 5 pernyataan, dapat dibandingkan dengan 3 pernyataan dan dapat dipahami dengan 3 pernyataan. Pada seluruh elemen menunjukkan seluruh item pernyataan yang

diberikan oleh peneliti memperoleh persentase tertinggi pada kolom sangat setuju dan setuju, artinya pencapaian OPD kabupaten Banjarnegara dalam penerapan kualitas laporan keuangan yang digambarkan melalui tabel tersebut adalah tinggi.

E. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Validitas

Pengujian ini diperlukan dalam penelitian yang menggunakan data primer, hal ini digunakan untuk melihat valid atau tidaknya kuesioner yang diajukan oleh peneliti. Pengujian ini dilakukan dengan cara menguji korelasi antar skor/nilai item-item pertanyaan dengan skor total (*Pearson Corelation*). Berdasarkan banyaknya responden yaitu 60 responden, maka r tabel yang dijadikan acuan adalah sebesar 0,254. Sehingga jika r hitung lebih besar jika dibandingkan r tabel maka kuesioner dinyatakan valid. Berikut hasil dari uji validitas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig	Kriteria
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	KLKPD1	0,874	0,254	0,00	Valid
	KLKPD2	0,806	0,254	0,00	
	KLKPD3	0,838	0,254	0,00	
	KLKPD4	0,829	0,254	0,00	
	KLKPD5	0,889	0,254	0,00	
	KLKPD6	0,916	0,254	0,00	
	KLKPD7	0,886	0,254	0,00	
	KLKPD8	0,885	0,254	0,00	

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig	Kriteria
	KLKPD9	0,891	0,254	0,00	
	KLKPD10	0,880	0,254	0,00	
	KLKPD11	0,849	0,254	0,00	
	KLKPD12	0,821	0,254	0,00	
	KLKPD13	0,856	0,254	0,00	
	KLKPD14	0,843	0,254	0,00	
	KLKPD15	0,856	0,254	0,00	
	KLKPD16	0,840	0,254	0,00	
Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	TPSAP1	0,746	0,254	0,00	Valid
	TPSAP2	0,464	0,254	0,00	
	TPSAP3	0,795	0,254	0,00	
	TPSAP4	0,741	0,254	0,00	
	TPSAP5	0,763	0,254	0,00	
	TPSAP6	0,741	0,254	0,00	
	TPSAP7	0,774	0,254	0,00	
	TPSAP8	0,737	0,254	0,00	
	TPSAP9	0,580	0,254	0,00	
	TPSAP10	0,861	0,254	0,00	
	TPSAP11	0,762	0,254	0,00	
Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	TPSAP12	0,761	0,254	0,00	Valid
	TPSAP13	0,768	0,254	0,00	
	TPSAP14	0,662	0,254	0,00	
	TPSAP15	0,787	0,254	0,00	
	TPSAP16	0,779	0,254	0,00	
	TPSAP17	0,839	0,254	0,00	
	TPSAP18	0,723	0,254	0,00	
	TPSAP19	0,697	0,254	0,00	
	TPSAP20	0,774	0,254	0,00	
	TPSAP21	0,809	0,254	0,00	
	TPSAP22	0,739	0,254	0,00	

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig	Kriteria
	TPSAP23	0,686	0,254	0,00	
	TPSAP24	0,508	0,254	0,00	
	TPSAP25	0,530	0,254	0,00	
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	SAKD1	0,847	0,254	0,00	Valid
	SAKD2	0,857	0,254	0,00	
	SAKD3	0,832	0,254	0,00	
	SAKD4	0,862	0,254	0,00	
	SAKD5	0,853	0,254	0,00	
	SAKD6	0,864	0,254	0,00	
	SAKD7	0,812	0,254	0,00	
	SAKD8	0,921	0,254	0,00	
	SAKD9	0,834	0,254	0,00	
	SAKD10	0,879	0,254	0,00	
	SAKD11	0,883	0,254	0,00	
	SAKD12	0,907	0,254	0,00	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	SPIP1	0,884	0,254	0,00	Valid
	SPIP2	0,884	0,254	0,00	
	SPIP3	0,819	0,254	0,00	
	SPIP4	0,875	0,254	0,00	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	SPIP5	0,892	0,254	0,00	Valid
	SPIP6	0,788	0,254	0,00	
	SPIP7	0,908	0,254	0,00	
	SPIP8	0,898	0,254	0,00	
	SPIP9	0,901	0,254	0,00	
	SPIP10	0,875	0,254	0,00	
	SPIP11	0,876	0,254	0,00	
	SPIP12	0,866	0,254	0,00	
	SPIP13	0,807	0,254	0,00	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	KSDM1	0,840	0,254	0,00	Valid
	KSDM2	0,880	0,254	0,00	

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Sig	Kriteria
	KSDM3	0,833	0,254	0,00	
	KSDM4	0,840	0,254	0,00	
	KSDM5	0,727	0,254	0,00	
	KSDM6	0,797	0,254	0,00	
	KSDM7	0,849	0,254	0,00	
	KSDM8	0,804	0,254	0,00	
	KSDM9	0,904	0,254	0,00	
	KSDM10	0,814	0,254	0,00	
	KSDM11	0,915	0,254	0,00	
	KSDM12	0,829	0,254	0,00	
	KSDM13	0,815	0,254	0,00	
	KSDM14	0,826	0,254	0,00	
	KSDM15	0,865	0,254	0,00	
	KSDM16	0,806	0,254	0,00	
	KSDM17	0,856	0,254	0,00	

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.12 dapat dilihat bahwa seluruh item pembentuk instrumen pertanyaan untuk masing – masing variabel yang digunakan oleh peneliti mendapatkan *Pearson Correlation value* $\geq 0,254$ atau r hitung $> r$ tabel dengan nilai sig $0,00 < 0,05$. Sehingga, kuesioner yang digunakan oleh peneliti dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian ini diperlukan dalam penelitian yang menggunakan data primer. Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen berupa kuesioner yang diajukan oleh peneliti dapat digunakan lebih dari satu kali (Nazaruddin dan Agus, 2016). Selain itu, alat-alat ukur data juga

digunakan untuk menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsisten yang baik dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan dalam waktu yang berbeda. Pengujian ini dilakukan setelah dilakukannya uji validitas dengan mengambil pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid. Berikut hasil dari uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.13
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>croanbach alpha</i> (α)	Kriteria dan tingkatan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,976	Reliabel sangat tinggi
Tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,961	Reliabel sangat tinggi
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,968	Reliabel sangat tinggi
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	0,971	Reliabel sangat tinggi
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	0,972	Reliabel sangat tinggi

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa melalui perhitungan koefisien *croanbach alpha* (α) untuk masing – masing variabel yang digunakan oleh peneliti sudah memenuhi tingkat reliabilitas minimum sebesar 0,4. Sedangkan untuk tingkatan reliabilitas menurut Guilford, 1956 dalam Bambang, 2008 jika *croanbach alpha* (α) berada pada angka diantara 0,8 sampai dengan 1,00 ($0,8 < \text{croanbach alpha} (\alpha) < 1,00$) maka reliabilitas sangat tinggi. Sehingga, kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali.

F. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memenuhi dari asumsi regresi linear berganda pada penelitian ini. Uji Normalitas, Miltikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Pengujian ini digunakan untuk melihat apakah beberapa variabel telah berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian normalitas yaitu dengan ketentuan yang digunakan oleh peneliti, melihat dari Uji Kolmogorov smirnof. Data dianggap sudah berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,05 jika P Value > 0,05 maka data telah berdistribusi normal dan sebaliknya jika P Value < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Berikut hasil dari uji normalitas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.14

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0,317	Data Normal

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.13 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,317 ($0,317 > 0,05$) sehingga data yang diterima oleh peneliti telah berdistribusi normal atau sudah memenuhi pengujian asumsi klasik untuk normalitas.

2. Uji Multikolinieritas

Pengujian ini diperlukan dalam persamaan regresi berganda, hal ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Kriteria pengujian multikolinieritas yang dianggap dapat memenuhi asumsi klasik dan model regresi bebas dari multikolinieritas dapat dilihat dari dua hal yaitu Nilai Tolerance $> 0,1$ dan Nilai VIF < 10 . Berikut hasil dari uji multikolinieritas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.15

Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
Tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,612	1.634	Bebas dari Multikolinieritas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,633	1.580	
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	0,850	1.176	
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	0,583	1.715	

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.15 dapat dilihat bahwa nilai tolerance seluruh variabel yang diperoleh lebih besar dari 0,1 dan juga untuk nilai VIF yang diperoleh lebih kecil dari 10, hal ini menunjukkan model regresi bebas dari multikolinieritas. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda

3. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian ini diperlukan dalam persamaan regresi berganda, hal ini dilakukan untuk melihat ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual antara observasi satu dengan yang lainnya. Jika residualnya memiliki kesamaan varians, maka disebut homoskedastisitas (model regresi baik) yaitu dapat dilihat dari nilai sig > 0,05 dan jika sebaliknya, maka disebut terjadi heteroskedastisitas (model regresi tidak baik) yaitu dapat dilihat dari nilai sig < 0,05 (Sunyoto, 2007). Berikut hasil dari uji heteroskedastisitas yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.16

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Kesimpulan
Tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,052	Homoskedastisitas
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	0,866	Homoskedastisitas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3)	0,920	Homoskedastisitas
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	0,573	Homoskedastisitas

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.16 dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk masing – masing variabel yang digunakan oleh peneliti lebih besar dari 0,05 yaitu variabel Tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebesar $0,052 > 0,05$, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar $0,866 > 0,05$, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebesar $0,920 > 0,05$ dan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar $0,573 > 0,05$. Sehingga, ke

empat variabel terdapat kesamaan varians dari residual antara observasi satu dengan yang lainnya atau menunjukkan bahwa model regresi dianggap baik (homoskedastisitas).

G. Uji Hipotesis dan Analisa Data

Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda, hal ini dilakukan oleh peneliti karena variabel yang digunakan terdiri dari variabel dependen dan beberapa variabel independen.

Sehingga model regresi yang dikembangkan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan adalah:

$$Y = a + \beta_1 \text{TPSAP} + \beta_2 \text{SAKD} + \beta_3 \text{SPIP} + \beta_4 \text{KSDM} + e$$

Keterangan :

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
a	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_4$	= Koefisien regresi
TPSAP	= Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
SAKD	= Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
SPIP	= Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
KSDM	= Kompetensi Sumber Daya Manusia
e	= Koefisien Error

Tabel 4.17

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel	Koef. Regresi	T	Sig	Keterangan
Konstanta	-15.692	-1.899	0,063	Signifikan
Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,281	3,255	0,002	Signifikan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,467	2,798	0,007	Signifikan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,107	0,922	0,361	Tidak Signifikan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,351	3,272	0,002	Signifikan
F statistics	27,048			
Sig. F	0,000			
Adjusted R Square	0,638			

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.17 dapat dilihat bahwa:

$$Y = 0,281X1 + 0,467X2 + 0,107X3 + 0,351X4 \text{ dengan keterangan :}$$

Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

X1 = Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

X2 = Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

X3 = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

X4 = Kompetensi Sumber Daya Manusia

Penjelasan lebih lanjut mengenai model tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Variabel tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai 0,281

- b. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X2) berpengaruh positif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai 0,467
- c. Variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X3) berpengaruh positif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai 0,107
- d. Variabel kompetensi sumber daya manusia (X4) berpengaruh positif kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) dengan nilai 0,351

1. Uji Parsial (Uji t)

Uji Parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji hipotesis yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.18

Hasil Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-15,692	8,262		-1,899	0,063
Tingkat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah	0,281	0,086	0,326	3,255	0,002
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,467	0,167	0,275	2,798	0,007
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	0,107	0,116	0,078	0,922	0,361
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,351	0,107	0,335	3,272	0,002

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.18 dapat dilihat bahwa menurut kriteria uji parsial (uji t) terdapat satu hipotesis yang ditolak karena tidak berpengaruh secara signifikan yaitu hipotesis ke tiga dan tiga hipotesis yang diterima dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Uji Hipotesis pertama (H_1)

Nilai T hitung yang diperoleh pada variabel tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan (TPSAP) yaitu 3,255 (positif) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka H_1 diterima. Sehingga, tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

b. Uji Hipotesis kedua (H_2)

Nilai T hitung yang diperoleh pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yaitu 2,798 (positif) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$) maka H_2 diterima. Sehingga, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Uji Hipotesis ketiga (H_3)

Nilai T hitung yang diperoleh pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yaitu 0,922 (positif) namun, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,361 > 0,05$) maka H_3 ditolak. Sehingga, sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan namun

cenderung positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

d. Uji Hipotesis keempat (H₄)

Nilai T hitung yang diperoleh pada variabel kompetensi sumber daya manusia (KSDM) yaitu 3,272 (positif) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka H₄ diterima. Sehingga, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil dari uji simultan yang disajikan dalam tabel:

Tabel 4.19

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	3998,224	4	999,556	27,048	0,000
Residual	2032,509	55	36,955		
Total	6030,733	59			

(Sumber : Data primer – diolah 2017)

Berdasarkan pada tabel 4.19 dapat dilihat bahwa nilai F hitung yang diperoleh sebesar 27,048 (positif) dan tingkat signifikansi 0,000. Melihat dari hasil uji dengan F hitung $27,048 > F$ tabel 2,54 dan tingkat signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$),

sehingga secara simultan yang terdiri dari variabel tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), sistem pengendalian intern pemerintah (X3) dan kompetensi sumber daya manusia (X4) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y).

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.20

Hasil Koefisiensi Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,814	0,663	0,638	6,079

Berdasarkan pada tabel 4.20 dapat dilihat bahwa nilai dari Adjusted R Square yang merupakan koefisien determinasi dari variabel tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), sistem akuntansi keuangan daerah (X2), sistem pengendalian intern pemerintah (X3) dan kompetensi sumber daya manusia (X4) memiliki kemampuan menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) sebesar 0,638 atau 63,8%. Sehingga, sisa dari hal tersebut yaitu ($100\% - 63,8\% = 36,2\%$) merupakan kemampuan menjelaskan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) melalui faktor lainnya diluar dari faktor serta model yang dibuat oleh peneliti.

H. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris beberapa faktor yang diduga oleh peneliti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemda yang berada di OPD kabupaten Banjarnegara, berikut analisis serta pembahasan lebih lanjut mengenai pengaruh tersebut:

1. Pengaruh Tingkat Penerapan SAP terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Transparansi dan akuntabel merupakan sifat yang seharusnya ada dalam sebuah laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu andil pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas adalah dengan dikeluarkannya UU No. 17 Th. 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa syarat bentuk dan isi suatu laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, baik dalam penyusunan maupun penyajiannya dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dan ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan baik dalam menyusun maupun menyajikan laporan keuangan pada pemerintahan (pusat dan daerah) Mahsun (2006). Sehingga, SAP merupakan pedoman yang digunakan oleh setiap instansi pemerintah di Indonesia dan berkekuatan hukum serta dibuat sebagai upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil dari uji hipotesis pertama (H_1) menunjukkan nilai T hitung yang diperoleh pada variabel tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan (TPSAP) yaitu 3,255 (positif) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka H_1 diterima secara statistik. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh positif dari tingkat penerapan SAP dapat dilihat berdasarkan tabel 4.10 dimana pengukuran yang digunakan peneliti untuk variabel ini terdiri dari 11 elemen yaitu PSAP No. 1 sampai dengan PSAP No. 11, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa hanya 2 dari 11 elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral dan lainnya menyetujui serta selalu melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Artinya responden telah menerapkan PSAP No. 1 sampai dengan PSAP No. 11 dengan baik.

Sehingga, tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan tersebut maka tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan termasuk salah satu faktor yang menentukan kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin digunakannya SAP sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyajian dari bentuk dan isi laporan keuangan juga semakin berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Adhi dan Suhardjo (2013) dan Wati, dkk (2014) yang menyatakan penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Dalam menyajikan laporan keuangan dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu penyusunannya. Sistem yang dibutuhkan dalam hal ini adalah sistem akuntansi. Penyajian laporan keuangan yang diharapkan adalah laporan keuangan yang berkualitas. Berdasarkan harapan tersebut maka, dalam penyusunannya dibutuhkan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD).

Pengertian dari SAKD berdasarkan Permendagri No. 13 Th. 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, bahwa SAKD adalah suatu sistem yang dirancang sedemikian rupa menjadi serangkaian prosedur yang dapat dilakukan dengan dua hal baik secara manual ataupun bantuan dari aplikasi yang tersedia di komputer meliputi empat proses yaitu pengumpulan data, pencatatan (record-keeping), pengikhtisaran (summarizing), pelaporan anggaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan APBD, pelaksanaannya dijalankan berdasar PABU yang telah diatur dalam perda. Melihat dari salah satu tujuan dibuatnya SAKD yaitu menyediakan informasi keuangan secara cermat, lengkap dan akurat sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat menyajikan laporan keuangan yang dapat dipertanggung jawabkan, handal dan dapat digunakan oleh pihak - pihak eksternal. Implementasi SAKD harus berdasar pada kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga dapat memberi peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil uji hipotesis kedua (H_2) menunjukkan nilai T hitung yang diperoleh pada variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) yaitu 2,798 (positif) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,007 < 0,05$) maka H_2 diterima secara statistik. Sehingga, sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh positif dari SKD dapat dilihat berdasarkan tabel 4.10 dimana pengukuran yang digunakan peneliti untuk variabel ini terdiri dari 3 elemen yaitu identifikasi, pencatatan dan pelaporan, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa 1 dari 3 elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral dan lainnya menyetujui serta melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Artinya responden telah melakukan identifikasi, pencatatan dan pelaporan dengan baik. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan tersebut maka sistem akuntansi keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menentukan kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sejalan dengan semakin digunakannya SKD yang baik maka laporan keuangan juga semakin berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rovieyanti (2012), Wati, dkk (2014), dan Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan SKD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Instansi pemerintah merupakan suatu organisasi yang beranggotakan orang – orang yang telah dipilih sebagai pemberi layanan dan pemegang amanah atas segala hal yang telah dilimpahkan. Salah satu amanah yang telah diberikan yaitu menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Adapun dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya dibutuhkan kompetensi yang dimiliki, melainkan juga membutuhkan suatu sistem ketahanan. Di Instansi pemerintahan, sistem ketahanan tersebut disebut dengan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Selain itu, dapat dilihat dari salah satu tujuan dibuatnya SPIP yaitu untuk menghasilkan informasi keuangan (*financial information*) yang relevan (*relevance*), akurat (*accurate*) dan andal (*reliability*).

Hasil dari uji hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan nilai T hitung yang diperoleh pada variabel SPIP yaitu 0,922 (positif) namun, nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 ($0,361 > 0,05$) maka H_3 ditolak secara statistik. Sehingga, SPIP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh dari SPIP dapat dilihat berdasarkan tabel 4.10 dimana pengukuran yang digunakan peneliti untuk variabel ini terdiri dari 3 elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko dan aktivitas pengendalian, dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa semua elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral dalam melaksanakan pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Artinya responden beranggapan bahwa OPD kabupaten Banjarnegara memiliki lingkungan pengendalian, penilaian

resiko dan aktivitas pengendalian yang cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan tersebut maka seharusnya SPIP termasuk salah satu faktor yang menentukan kualitasnya suatu laporan keuangan pemda. Namun, fakta yang diperoleh peneliti menunjukkan sebaliknya yaitu bukan termasuk faktor yang menentukan kualitasnya suatu laporan keuangan pemda. Signifikansi tidak berpengaruhnya SPIP terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat terjadi karena SPIP pada OPD kabupaten Banjarnegara hanya sekedar formalitas saja keberadaannya. Sehingga apabila SPIP pada kabupaten Banjarnegara baik maka belum tentu laporan keuangan yang dihasilkan berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yaitu Budiawan dan Budi (2014) dan Yensi, dkk (2014) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

4. Pengaruh Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda

Pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu keinginan masyarakat yaitu terciptanya pemerintahan yang baik (Good governance government). Salah satu bentuk dari pemenuhan keinginan tersebut dapat diberikan dengan menyajikan laporan keuangan.

Salah satu bentuk produk yang merupakan hasil dari bidang akuntansi disebut dengan laporan keuangan. Selain itu laporan keuangan juga dapat dijadikan media bagi pemerintah dalam memperlihatkan kinerjanya. Dalam hal

ini laporan keuangan yang diharapkan adalah laporan keuangan yang berkualitas, yang mana SDM merupakan salah satu faktor penting terwujudnya harapan tersebut. Kemudian, SDM yang dibutuhkan tidak hanya sekedar sebagai pelengkap berdirinya suatu organisasi melainkan SDM yang berkompeten.

Kompetensi SDM merupakan kemampuan atau kapabilitas dan kapasitas yang terbentuk dari sinkronisasi atas pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan perilaku (attitude) yang dimiliki seseorang (individu) dalam suatu organisasi atau suatu sistem guna melaksanakan kewajiban atau fungsi-fungsi atas tercapainya tujuan secara efektif dan efisien (Hutapea dan Thoha, 2008). Melalui SDM yang berkompeten maka, laporan keuangan akan semakin efektif dan efisien dalam penyajiannya. Sehingga, SDM yang berkompeten sangat dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil dari uji hipotesis keempat (H_4) menunjukkan nilai T hitung yang diperoleh pada variabel kompetensi sumber daya manusia (SDM) yaitu 3,272 (positif) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$) maka H_4 diterima. Sehingga, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengaruh positif dari kompetensi SDM dapat dilihat berdasarkan tabel 4.10 dimana pengukuran yang digunakan peneliti untuk variabel ini terdiri dari 3 elemen yaitu pengetahuan, keahlian dan perilaku dalam tabel tersebut menunjukkan bahwa semua elemen yang memiliki rata – rata jawaban netral. Artinya pengetahuan, keahlian dan perilaku yang dimiliki oleh responden sudah cukup baik. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan

tersebut maka kompetensi sumber daya manusia termasuk salah satu faktor yang menentukan kualitasnya suatu laporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga sejalan dengan semakin berkompetennya SDM yang dimiliki maka laporan keuangan juga semakin berkualitas. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rovieyanti (2012), Wati, dkk (2014), Yensi, dkk (2014), dan Andini dan Yusrawati (2015) yang menyatakan Kompetensi SDM berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.